

KORUPSI PENGHAMBAT DEMOKRASI: MENYOROTI KRISIS TRANSPARANSI PEMERINTAH DALAM KORUPSI BANSOS JULIARI BATUBARA

¹Ragilia Dwi Pradita; ²Silvana Putri Priageng; ³Rika Dewi Sartika; ⁴Fatkhuri

¹²³⁴University of Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 2024

Revised November 2024

Accepted November 2024

Available online November 2024

Email: 12310413025@mahasiswa.upnvj.ac.id,

2310413029@mahasiswa.upnvj.ac.id,

2310413035@mahasiswa.upnvj.ac.id,

fatkhuri@upnvj.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Abstract

This research reveals the corruption case of the covid-19 social assistance fund. This corruption case involved one of the social ministers who was in office at that time, namely Juliari Batubara. Juliari Batubara took advantage of his position and the opportunity for the loss of oversight functions and the loss of transparency in order to prosper his own life. The main objective of this research is to analyze the impact of this corruption. In addition, this research also examines the weaknesses in the governance of the distribution of funding to be used for social assistance and provides recommendations for good governance reforms that prioritize the principles of transparency and supervision. This research uses a qualitative method with a case study approach. The case study approach is used to facilitate researchers in examining and explaining problems with cases that have occurred before. Data is

obtained from literature sources using books, journals or articles that can support the arguments of researchers. The results obtained showed that the corruption that dragged Juliari Batubara's name indicated the existence of policy factors, transparency and weak supervision. This social assistance corruption case forms a lot of public distrust of the government and perpetuates bad perceptions. This corruption also has an impact on the level of community welfare.

Keywords: Government, Corruption, COVID-19

Abstrak

Penelitian ini mengungkap kasus korupsi dana bantuan sosial covid-19. Kasus korupsi ini melibatkan salah satu menteri sosial yang sedang menjabat pada waktu itu yaitu Juliari Batubara. Juliari Batubara memanfaatkan jabatan serta kesempatan atas hilangnya fungsi pengawasan serta hilangnya transparansi demi mensejahterakan kehidupannya sendiri. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan dari adanya korupsi ini. Selain itu penelitian ini juga mengkaji bagaimana kelemahan tata kelola distribusi pendanaan yang akan digunakan untuk bantuan sosial serta memberikan rekomendasi reformasi tata kelola yang baik yang mengedepankan asas transparansi dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus digunakan untuk mempermudah peneliti dalam mengkaji serta menjelaskan mengenai permasalahan dengan kasus yang pernah terjadi sebelumnya. Data diperoleh dari sumber literatur menggunakan buku, jurnal ataupun artikel yang dapat mendukung argumen dari peneliti. Hasil yang didapatkan bahwa korupsi yang menyeret nama Juliari Batubara mengindikasikan adanya faktor kebijakan, transparansi serta pengawasan yang lemah. Kasus korupsi bantuan sosial ini membentuk banyak ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan melanggengkan persepsi buruk. Korupsi ini juga berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Pemerintah, Korupsi, COVID-19

Pendahuluan

Topik penelitian yang menyoroti krisis transparansi pemerintah pada kasus korupsi bansos Juliari Batubara menarik untuk diteliti karena pada kasus korupsi Juliari Batubara menjadikan tindakan korupsi sebagai bentuk dari hambatan dari demokrasi. Dalam praktiknya, good governance ditandai dengan transparansi dalam mekanisme pemerintahan secara berkeseluruhan (Pratiwi, PS., & Ningsih, S., 2022). Pada penerapan good governance terdapat tantangan yang mengiri berjalannya tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya adalah korupsi. Korupsi merupakan tantangan dalam good governance yang lazim terjadi dilakukan sehingga menyebabkan tata kelola pemerintahan berujung pada pemerintahan yang buruk. Hal ini dikarenakan korupsi telah mengesampingkan prinsip-prinsip good governance. Indonesia merupakan negara yang menghadapi tantangan dalam penerapan good governance salah satunya adalah korupsi. Menurut Indonesiabaik.id pada tahun 2020 Indonesia mengalami penurunan Indeks Persepsi Korupsi dari tahun 2019 yang bermula pada urutan 85 dari 180 negara menjadi urutan 102 dari 180. Kenaikan urutan Indonesia sebagai negara dengan indeks persepsi korupsi di tahun 2020 tentu tidak luput dari adanya kasus korupsi dana bantuan sosial yang menyebabkan terjadinya krisis kepercayaan masyarakat. Kasus korupsi Juliari Batubara merupakan hasil dari adanya krisis transparansi pemerintahan terkait dengan pengelolaan dana bantuan sosial. Adanya fenomena korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara terkait dengan penyalahgunaan bantuan sosial juga akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat yang dapat mempengaruhi menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia.

Fenomena kejahatan yang sering menjadi sorotan di pemerintahan adalah korupsi. Secara umum, korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh pejabat untuk kepentingan pribadi (Pustha, Fabianus Wahyu Tri Buana & Alfiansyah Fauzan, 2021). Dalam konteks negara Indonesia, korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang seringkali terjadi di pemerintahan. Salah satu kejahatan korupsi yang menjadi sorotan publik adalah kasus korupsi terkait dengan bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 yang melibatkan menteri sosial yaitu Juliari Batubara. Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka pada kasus korupsi dana bantuan sosial karena adanya tindakan suap-menyuap sebanyak 17 miliar yang diterima oleh Juliari Batubara yang dimana dana bantuan sosial tersebut diluncurkan oleh pemerintah dalam rangka membantu masyarakat di Jabodetabek ditengah kondisi pandemi COVID-19 (Intan Leliana., et al, 2021). Kasus korupsi Juliari Batubara merupakan cerminan kualitas banyaknya pejabat di Indonesia yang melakukan penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi. Adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara di tengah kondisi genting seperti masa pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Berbagai penelitian terdahulu terkait dengan pembahasan kasus korupsi dana bantuan sosial Juliari Batubara termuat temuan menarik pada pembahasannya. Salah satu penelitian terdahulu menekankan pada penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Juliari Batubara demi kepentingan pribadi merupakan akar dari penyebab kasus korupsi. Hal ini menjadikan penyalahgunaan kekuasaan sebagai pondasi budaya korupsi yang mengakar di Indonesia. Penelitian-penelitian terdahulu juga menemukan adanya korupsi di Indonesia telah terbukti memberikan banyak dampak seperti kerusakan pada demokrasi dan juga kerusakan kehidupan berkedaulatan rakyat. Banyak dampak yang disebabkan oleh tindakan korupsi di Indonesia tidak terlepas dari lemahnya peran pemerintah. Tentu dengan ada lemahnya peran pemerintah dapat berdampak pada buruknya tindakan korupsi di Indonesia yang salah satunya adalah tindakan korupsi dana bantuan sosial Juliari Batubara.

Terdapat research gap yang signifikan pada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu memiliki fokus kajian penelitian yang membahas penyebab serta dampak dari adanya tindakan korupsi. Adanya fokus kajian penelitian ini menjadikan keterbatasan pada penelitian terdahulu karena penelitian terdahulu tidak membahas bagaimana lemahnya peran pemerintah. Lemahnya peran pemerintah dari adanya penyebab kasus korupsi Juliari Batubara disebabkan karena ketidaktransparan pengelolaan dana bantuan sehingga menjadi penyebab utama dalam celah terjadinya tindakan korupsi dana bantuan sosial Juliari Batubara. Ketidaktransparan dalam

pengelolaan dana bantuan sehingga menyebabkan tindakan korupsi tentu akan berdampak pada kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah yang akan mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian kami akan memfokuskan bagaimana ketidaktransparan pemerintah dalam pengelolaan dana bantuan sosial sehingga menjadi celah penyebab kasus korupsi Juliari Batubara. Dengan memahami ketidaktransparan pemerintah terkait pengelolaan dana bantuan sosial akan memberikan kontribusi terbaru terkait dengan adanya peran pemerintah terhadap transparansi. Penelitian ini akan memberikan wawasan mengenai dengan adanya transparansi yang baik dari pemerintah terhadap pengelolaan dana bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 dapat berperan penting dalam upaya mengatasi tindakan kejahatan korupsi sehingga korupsi tidak lagi menjadi hambatan bagi demokrasi masyarakat Indonesia. Maka dari itu terdapat rumusan masalah yang mendasari dibentuknya penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk krisis transparansi pemerintah dalam kasus korupsi dana bansos Juliari Batubara?
2. Bagaimana krisis transparansi dalam kasus korupsi dana bansos Juliari Batubara dapat mempengaruhi kualitas demokrasi?
3. Bagaimana upaya pemerintah yang dapat diambil dalam mengatasi krisis transparansi dalam mencegah celah terjadinya korupsi?

KAJIAN PUSTAKA

Korupsi menjadi hal paling berat dalam mewujudkan demokrasi di sebuah negara. Studi yang dilakukan oleh Suhartono., et al (2023) dengan judul *Demokrasi “Berbiaya Tinggi Penyebab Korupsi Seakan Abadi”* menyoroti bagaimana kaitan korupsi dengan demokrasi. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan hubungan politik ekonomi. Dengan tujuan untuk menjabarkan deskripsi secara sistematis dengan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena yang terjadi. Temuan dari jurnal penelitian ini mengungkapkan bahwa demokrasi mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam menjalankan pemerintahan. Dimana masyarakat dapat memilih wakil wakilnya dalam sebuah sistem yang dinamakan dengan pemilu. Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan korupsi merupakan sebuah bentuk penyakit kekuasaan yang selalu hadir dalam sebuah tatanan kenegaraan. Hasil dari adanya penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam sebuah ajang pemilihan suara, kandidat yang akan dipilih harus menanggung biaya yang besar. Keadaan seperti ini akan memainkan peran dari politik uang yang akan mengubah makna demokrasi. Di Satu sisi, demokrasi membantu mewujudkan adanya keterlibatan masyarakat dalam pemerintah tapi di satu sisi memunculkan adanya praktik korupsi yang menghambat proses demokrasi. Dengan kajian literatur yang sudah dijabarkan diatas sebagai acuan, mengindikasikan adanya kesamaan diantara struktur pembahasan serta perbedaan fokus penelitian. Persamaan penelitian yang akan kami lakukan dengan jurnal terdahulu adalah dengan menyoroti bagaimana tindak korupsi dapat menghambat sebuah sistem demokrasi di suatu negara. Korupsi yang melibatkan aktor-aktor negara sangat mengganggu sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Selain memiliki sebuah persamaan, tentu akan muncul perbedaan yang menjadi dasar untuk membuat sebuah penelitian baru. Penelitian yang kami tidak akan berfokus pada pembahasan pemilihan umum sebagai media untuk melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian kami akan mengkaji bagaimana sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu bantuan sosial pada saat pandemi Covid-19, dapat membuka lapangan bagi tindak pidana korupsi. Penelitian kami juga akan meneliti kegagalan akuntabilitas pejabat publik. Kasus ini menunjukkan sebuah kegagalan dalam akuntabilitas pejabat publik. Juliari Batubara, sebagai Menteri Sosial, mempunyai tugas moral dan hukum untuk menggunakan dana bantuan dengan baik. Tetapi, tidak adanya transparansi dalam bagaimana dia menjalankan tugasnya dalam mengurus anggaran negara, terutama anggaran bantuan sosial yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Kasus yang disajikan dalam judul penelitian, akan mengangkat Juliadi Batubara sebagai tersangka kasus korupsi dana bansos atau bantuan sosial. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ira Ardila, et al (2023) kekuasaan merupakan salah satu hal yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi. Dengan judul jurnal "Penyalahgunaan kekuasaan dalam Tindakan Korupsi Bantuan Sosial oleh Pejabat Publik Perspektif Max Weber", menyoroti kasus Juliari Batubara yang melakukan tindak pidana korupsi. Jurnal ini menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya dan mengumpulkan data melalui studi literatur. Jurnal ini membahas bagaimana pemegang kekuasaan berperan dalam keberhasilan program dan kebijakan publik, serta bagaimana pemegang kekuasaan menentukan cita-cita dan tujuan nasional untuk mensejahterakan rakyatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi dampak korupsi yang disebabkan oleh penyelewengan kekuasaan oleh mereka yang memegang kekuasaan. Dalam kasus ini, penelitian ini melihat Menteri Sosial Juliari Batubara dari sudut pandang teori tindakan sosial dan kekuasaan Max Weber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan perspektif Weber tentang kelas, status (kedudukan), dan partai, Juliari Batubara telah melakukan korupsi kepada bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak oleh COVID-19 sebesar Rp 32,2 miliar. Juliari Batubara memenuhi ketiga dimensi tersebut. Sebaliknya, tindakan Juliari Batubara dapat dikategorikan sebagai tindakan sosial karena dampak korupsi mempengaruhi kehidupan sosial dan stabilitas negara, terutama untuk kelompok miskin. Jurnal di atas membahas mengenai bagaimana tindakan korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara merupakan sebuah tindakan atas kekuasaannya di ranah pemerintahan. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kekuasaan Max Weber. Persamaan penelitian kami dengan jurnal "Penyalahgunaan kekuasaan dalam Tindakan Korupsi Bantuan Sosial oleh Pejabat Publik Perspektif Max Weber" adalah bagaimana kita dapat menjelaskan keterkaitan kekuasaan yang dipegang oleh Juliari Batubara sebagai mantan Menteri Sosial dalam melakukan tindak pidana korupsi. Dapat kita lihat juga perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang kami buat. Tak hanya menyoroti mengenai kekuasaan akan menyebabkan korupsi, penelitian kami akan membahas mengenai kurangnya pengawasan dari pihak eksternal maupun internal. Dalam kasus korupsi Juliari Batubara penelitian ini akan menyoroti bagaimana ketidakhadiran pengawasan saat mengelola bantuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat di era covid-19. Lemahnya pengawasan oleh pihak-pihak terkait, membuka celah besar untuk Juliari Batubara dalam melakukan tindak korupsi.

Jurnal yang ditulis oleh Mungiu-Pippidi A (2023) dengan judul "Transparency and corruption: Measuring real transparency by a new index". Penelitian ini membahas hubungan antara transparansi dan korupsi, subjek yang sangat relevan dalam konteks pemerintahan demokratis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analitis yang menggabungkan teori dan data empiris untuk mengeksplorasi bagaimana transparansi dapat berfungsi sebagai alat untuk mengurangi korupsi. Temuan dari jurnal ini menunjukkan bahwa *transparența de jure* (transparansi hukum) seringkali tidak sejalan dengan *transparența de facto* (transparansi dalam praktik), menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam implementasi. Penelitian ini menekankan pentingnya institusi dan norma dalam membatasi tindakan aktor-aktor pemerintah, serta bagaimana transparansi dapat dilihat sebagai hak asasi manusia. Lebih lanjut, jurnal ini mengungkapkan bahwa negara-negara dengan tingkat pengembangan manusia yang rendah mengalami kesulitan dalam menerapkan transparansi secara efektif. Hal ini disebabkan oleh akses terbatas ke internet dan infrastruktur yang tidak memadai, yang menghambat transparansi digital. *Indice de transparență (T-Index)* yang dikaitkan dengan *indice de dezvoltare umană (HDI)* menunjukkan bahwa implementasi transparansi sangat bergantung pada tingkat pendapatan nasional dan pendidikan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa transparansi dan korupsi saling terkait, di mana kemajuan dalam transparansi dapat berkontribusi pada pengurangan korupsi, tetapi sangat dipengaruhi oleh konteks sosial-ekonomi. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana transparansi dapat dioptimalkan dalam konteks pemerintahan demokratis untuk memerangi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas publik. Kajian literatur di atas menyoroti bagaimana hubungan

transparansi dengan korupsi dengan subjeknya dengan konteks pemerintahan yang demokratis. Tentu terdapat persamaan serta perbedaan yang akan menjadikan penelitian kami menjadi sebuah penelitian baru bagi dengan topik korupsi dan transparansi. Persamaan jurnal ini dengan penelitian kami terletak pada pembahasan dan keterkaitan transparansi dengan demokrasi. Dengan tidak adanya transparansi, korupsi dapat terjadi. Kemajuan transparansi dapat membantu untuk mengurangi korupsi. Namun terdapat perbedaan yang signifikan yaitu jurnal ini tidak membahas proses transparansinya. Jurnal di atas menggunakan T-index untuk mengukur sebuah transparansi yang ada. Penelitian kami akan membahas mengenai proses pengadaan yang tidak transparan. Pengadaan barang untuk keperluan bantuan sosial (bansos) dilakukan dengan proses yang tidak melibatkan mekanisme lelang yang jelas, hal ini membuat celah untuk terjadinya nepotisme serta kolusi. Juliari Batubara serta koneksinya dituding memilih vendor yang memberikan uang sogok sebagai bentuk imbalan karena sudah diberikan kontrak pengadaan.

Studi yang dilakukan oleh Can Chen dan Sukumar Ganapati (2023) menyoroti bagaimana ide transparansi dapat menurunkan angka korupsi. Dengan mengangkat "Do transparency mechanisms reduce government corruption? A meta analysis". Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan meta analisis atau sebuah analisis yang menggabungkan beberapa penelitian untuk mendapatkan sebuah informasi. Meta analisis ini juga menggunakan metode kuantitatif untuk menggabungkan dampak dari studi empiris. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menggambarkan prospek serta keterbatasan mekanisme transparansi dalam mengurangi korupsi. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi pemerintah kepada publik. Transparansi adalah sebuah perwujudan serta penerapan dari good governance atau tata kelola yang baik. Transparansi ini akan memberikan masyarakat akses untuk mendapatkan informasi yang bersumber dari rapat terbuka dan kebijakan pemerintah. Konsep transparansi ini banyak mendapatkan perhatian pada negara demokrasi. Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa ada transparansi memiliki sebuah efek negatif yang cukup signifikan terhadap korupsi, walaupun hasil perhitungan yang didapatkan menunjukkan dampak yang dihasilkan kecil (efek rata-rata -0,022). Hal ini menunjukkan bahwa transparansi memiliki peran penting dalam usaha mengurangi korupsi. Meskipun dampak yang dihasilkan hanya sedikit. Jurnal diatas menjadi sebuah acuan pembuatan penelitian yang kami buat. Persamaan terletak pada pembahasan transparansi dan hubungannya dengan korupsi. Transparansi akan membuka kesempatan masyarakat untuk mengetahui sehingga akan terwujud sebuah kebijakan yang baik. Meskipun memiliki beberapa kesamaan, terdapat perbedaan yang menjadi dasar dari penelitian yang kami lakukan. Dalam jurnal tersebut, peneliti menggunakan meta analisis. Meta analisis digunakan untuk mengetahui dampak dari korupsi. Sedangkan penelitian kami akan membahas mengenai peran lembaga pengawasan yang kurang optimal. Walaupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya berhasil mengungkapkan kasus ini, tetapi peran Pengawas Kurang Optimal untuk pengawasan lembaga antikorupsi terhadap penyaluran dana sosial. Kasus ini menunjukkan bahwa yang memiliki anggaran besar seperti pelayanan sosial, tidak dilakukan seketat yang seharusnya Lemahnya koordinasi antar badan pengawas seperti BPK, KPK dan instansi lain juga membuat penyalahgunaan dana tersebut sulit dideteksi sejak dini.

Tak hanya itu jurnal ditulis oleh Aristri Rahma Magistra (2023) dengan jurnal yang berjudul "Pengaruh Budaya Korupsi dalam Pengikisan Peran Kehidupan Berkedaulatan Rakyat" membahas mengenai budaya korupsi dalam merusak kehidupan berkedaulatan rakyat terutama dalam Negara demokrasi. Metode yang digunakan dalam jurnal ini melalui pendekatan kualitatif dengan tujuan menganalisa kasus. Pada jurnal ini mengungkapkan bahwa budaya korupsi di Indonesia menjadi penghambat dalam kehidupan berkedaulatan rakyat karena korupsi menjadi faktor dalam hilangnya hak-hak pada kehidupan rakyat. Pada jurnal ini menggunakan kasus korupsi dimana salah satunya adalah kasus Korupsi Bantuan Sosial COVID-19 yang dilakukan oleh Juliari Batubara, tindakan korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara sangatlah tidak mencerminkan terpenuhinya hak-hak rakyat di masa pandemi COVID-19. Hasil dari jurnal ini menggarisbawahi bahwa budaya korupsi di Indonesia sudah melanggar

pemenuhan hak-hak rakyat Indonesia, oleh karena itu diperlukannya peran masyarakat dalam keterlibatan untuk menghilangkan pengaruh dari budaya korupsi yang merajalela di Indonesia. Jurnal di atas membahas mengenai pengaruh korupsi pada kehidupan berdaulat rakyat dengan menggunakan studi kasus korupsi Juliari Batubara. Terdapat beberapa persamaan dalam jurnal telah dijabarkan di atas dengan penelitian yang kami buat. Jurnal dan penelitian kami menyoroti bagaimana korupsi Juliari Batubara dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Di mana tindakan korupsi ini gagal untuk memenuhi hak-hak masyarakat. Meskipun memiliki persamaan dari berbagai aspek, ada perbedaan yang menjadi dasar pembuatan penelitian. Penelitian yang kami akan membahas mengenai dampak terhadap kepercayaan publik. Rendahnya transparansi tata kelola pemerintahan berdampak besar pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kasus korupsi di sektor kesejahteraan, terutama dalam situasi pandemi yang kritis, telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola dana publik secara efektif dan bertanggung jawab. Korupsi dalam penyaluran bantuan sosial memperburuk citra pemerintah dan membuat ketidakpercayaan pada seseorang, yang pada akhirnya dapat melemahkan legitimasi sistem demokrasi dan pemerintahan di Indonesia.

Selain itu, penelitian yang ditulis oleh Handayani (2022) dengan judul "Analisis Perilaku Korupsi dan Upaya Mewujudkan Good Governance di Indonesia". Penelitian ini membahas tentang sistem pemerintahan di Indonesia yang terus berbenah untuk mencapai good governance melalui kebijakan dan reformasi birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan berdasarkan fakta dan data yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi juga melibatkan pejabat di tingkat daerah, serta penegak hukum yang seharusnya menjadi penegak keadilan. Penelitian ini menekankan pentingnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan good governance, yang ditandai dengan transparansi dan akuntabilitas. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan adanya peningkatan kasus korupsi, yang menuntut tindakan tegas dari pemerintah. Reformasi birokrasi yang diusulkan dalam penelitian ini mencakup penataan kelembagaan, sistem kepegawaian, dan sistem pengawasan, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, yang sejalan dengan prinsip demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Dalam jurnal yang sudah dijabarkan di atas, fokus dari jurnal tersebut membahas mengenai perlunya transparansi dalam mendorong pemerintahan untuk mewujudkan sistem good governance dengan prinsip demokrasi. Terdapat beberapa persamaan pandangan dalam jurnal di atas dengan jurnal penelitian yang akan kami buat. Kesamaan terletak pada bagaimana pembahasan korupsi, transparansi dan keterkaitannya dalam mewujudkan sebuah demokrasi yang baik bagi sebuah negara. Tentu terdapat perbedaan yang menjadi alasan mengapa penelitian ini dilakukan khususnya dengan menyertakan studi kasus sebagai landasan untuk mempermudah peneliti dalam menjabarkan sebuah pembahasan. Penelitian kami akan mengkaji kurangnya audit yang independen dan terbuka. Kurangnya audit publik independen mengakibatkan kesulitan dalam mendeteksi penyimpangan penggunaan dana bantuan sosial. Audit internal tidak cukup untuk mengidentifikasi penyalahgunaan dana, dan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tidak dipublikasikan berdampak pada kurangnya transparansi pengelolaan. Selain itu, kami akan membahas tidak adanya mekanisme pelaporan dan partisipasi publik yang efektif. Partisipasi masyarakat dalam memantau penyaluran bantuan sosial hampir tidak ada. Tidak ada platform yang transparan bagi masyarakat untuk melacak penerima bantuan, jumlah bantuan, atau kemajuan pengiriman. Hal ini membatasi akses masyarakat terhadap informasi penting dan mengurangi kemampuan mendeteksi potensi korupsi. Mekanisme pelaporan penipuan atau korupsi di sektor ini juga tidak kuat atau terlindungi dengan baik, sehingga menyulitkan pihak internal untuk melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut akan dampak atau pembalasan dari musuh.

KONSEP DAN TEORI

Konsep Korupsi

Menurut Robert Klitgaard (2001) korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Teori GONE yang diungkapkan oleh Jack Bologne, korupsi bukan hanya sekedar peristiwa. GONE sendiri merupakan singkatan dari Greedy (serakah), Opportunity (kesempatan), Needs (kebutuhan) dan Expose (pengungkapan). Kesenakahan merupakan buntut dari adanya tindakan korupsi, Jika seseorang memiliki sifat keserakahan di dalam dirinya maka ia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menggunakan hak orang lain. Menurut Teori Vroom menggunakan variabel nilai (value) sebagai suatu variabel yang penting dan menentukan ekspektasi (expectation) dan motivasi (motivation) untuk bertindak dalam hidup seseorang (Putra, 2024:51). Teori Vroom menggambarkan bahwa seseorang akan memiliki motivasi untuk mencapai sesuatu yang ia inginkan. Seperti contohnya motivasi untuk menjadi orang yang kaya dan berkecukupan. Namun terkadang ekspektasi tak berjalan sesuai dengan harapan. Maka untuk mendapatkan kekayaan itu seseorang akan melakukan tindakan yang melanggar hukum salah satunya adalah tindak korupsi. Dan menurut teori Teori Michael Foucault mengatakan bahwa kekuasaan dalam konteks ini diartikan sebagai milik, kemampuan, atau modal dalam menggapai suatu tujuan tertentu dari tuan atau pemiliknyanya (Hardiansyah et al., 2023:165).

1. Teori Pilihan Rasional

Teori yang digagas oleh James Coleman (1990) melihat seorang individu sebagai aktor rasional yang mengambil keputusan untuk mencapai tujuan mereka. Individu berperan besar dalam mengambil keputusan terutama dalam mempertimbangkan sumberdaya yang ada dan batasan yang akan individu tersebut lalui, hal ini mencakup norma sosial dan struktur institusi. Aksi yang dilakukan individu, menurut Coleman adalah hasil dari perhitungan keuntungan-kerugian dari berbagai hasil-hasil yang akan terjadi oleh individu tersebut. Coleman juga menjelaskan dalam teori ini hubungan antara mikro yaitu tindakan individu dan makro yaitu struktur sosial, yang menunjukkan bahwa struktur sosial mempengaruhi keputusan seorang individu melalui norma dan aturan yang ada, selain itu teori ini juga menjelaskan bagaimana aksi individu yang dilakukan bersama-sama dapat membentuk ulang struktur sosial. Hal ini dijelaskan melalui alat analisis yang dinamai diagram bathub, diagram tersebut menjelaskan alur pengaruh individu dan masyarakat. Jika kita menilai tindakan yang dilakukan Juliari Batubara melalui teori ini maka kita bisa melihat bahwa tindakan korupsi ini dilakukan karena Juliari Batubara telah mempertimbangkan bahwa keuntungan atas tindakannya lebih besar daripada kerugiannya selain itu Juliari Batubara juga telah menilai bahwa batasan yang ada tidak akan mengganggu Tindakan yang akan dia lakukan, maka dari itu dia berani melakukan aksi tersebut.

2. Teori Principal-Agent

Menurut Groenendijk (dalam Sutarna dan Subandi, 2023) teori principal-agent sendiri mengasumsikan bahwa kepentingan principal (publik) dan agent (pejabat publik) berbeda. Principal menentukan aturan pembayaran dalam hubungannya dengan agent tetapi terdapat asimetri informasi yang menguntungkan agent untuk kepentingannya. Karena kurangnya pemantauan terhadap agent, seringkali kesempatan ini digunakan untuk melakukan tindakan yang akan menguntungkan diri sendiri. Maka dari itu dengan pengawasan yang lemah ini maka muncul tindak pidana korupsi sama seperti yang dilakukan oleh Juliari Batubara saat menjabat sebagai menteri sosial.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang akan kami lakukan mengenai “Korupsi sebagai Penghambat Demokrasi: Menyoroti Krisis Transparansi Governance Dalam Korupsi Bansos Juliari Batubara” akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dengan metode kualitatif merupakan sebuah penelitian yang berdasar pada sudut pandang, opini dan juga pengalaman terhadap sebuah fenomena tertentu. Informasi dari sebuah penelitian kualitatif didapatkan dengan melakukan wawancara sebagai sumber primer serta membaca banyak sumber bacaan seperti dari buku, jurnal ataupun makalah sebagai sumber sekunder. Informasi dan data yang didapatkan dari penelitian ini diperoleh melalui sumber sekunder dengan menggunakan sumber literatur sebagai landasan untuk membuat teori serta menjabarkan pembahasan. Tidak hanya itu, sumber literatur digunakan untuk memperoleh data dari sumber yang terjadi validitasnya sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan oleh penulis. Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan studi kasus untuk mempermudah peneliti dalam menjabarkan sebuah fenomena yang terjadi. Pendekatan studi kasus digunakan untuk mengetahui serta menginvestigasi masalah serta memberikan penyelesaian masalah. Pendekatan studi kasus ini membantu peneliti untuk menghubungkan topik pembahasan dengan fenomena tertentu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara

Pada tahun 2020 silam, Indonesia dikejutkan dengan adanya kemunculan virus covid-19 yang telah menyerang berbagai negara. Sebagai negara yang menjamin kesejahteraan serta keamanan masyarakatnya, pemerintah banyak menciptakan kebijakan-kebijakan untuk menekan angka penyebaran virus ini. salah satunya adalah dengan memperlakukan kebijakan Lock Down atau menutup segala akses kegiatan untuk keluar maupun masuk secara total. Lockdown memaksa masyarakat untuk tetap berada di rumah, tak hanya itu segala kegiatan mulai dari kegiatan belajar mengajar hingga proses bekerja juga dilakukan secara daring ataupun secara online. Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang berhasil dalam menekan angka penyebaran virus covid-19, namun pada kenyataannya banyak berbagai masalah yang muncul. Salah satunya adalah dibidang ekonomi masyarakat. dengan system ini, masyarakat yang bekerja di sector umkm merasakan dampak penurunan ekonomi yang tajam. Tidak hanya itu dengan munculnya virus covid-19, banyak perusahaan yang akhirnya harus mengurangi pemakaian jasa yang di hasilkan dari masyarakat. Sehingga munculah masalah baru yaitu ketimpangan ekonomi.

Berusaha untuk memperbaiki kondisi yang ada, pemerintah akhirnya membuat sebuah kebijakan untuk mengatasi hal ini. Pemberian bantuan sosial merupakan jawaban yang paling tepat untuk menekan angka ketimpangan ekonomi yang disebabkan oleh virus covid-19. Pemerintah bersama dengan menteri sosial saat itu yaitu Juliari Batubara saling bahu membahu untuk menyalurkan berbagai macam kebutuhan pokok kepada masyarakat. Namun sangat disayangkan, pada tanggal 6 Desember 2020, Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi bantuan sosial covid-19. Tidak hanya Juliari Batubara, KPK juga turut menetapkan dua dari tiga tim komitmen yaitu Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono. Fee tiap paket Bansos disepakati sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bantuan sosial (Purnama, 2021).

Korupsi bantuan sosial yang telah dilakukan oleh Juliari Batubara selaku Menteri sosial pada saat itu mengindikasikan hilangnya transparansi dalam terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Sebagai negara demokrasi, transparansi menjadi komponen yang penting karena transparansi menuntut adanya keterbukaan dan akses public terhadap berbagai informasi mengenai kebijakan serta keputusan. Transparansi yang baik akan memebangun tingkat kepercayaan public lewat keterbukaan. Cacatnya transparansi yang terjadi di dalam sistem kebijakan bantuan sosial covid-19 ini menurunkan tingkat demokrasi di Indonesia. Transparansi seharusnya menjadi prinsip utama dalam sistem distribusi bantuan sosial ini. Kasus korupsi

bantuan sosial covid ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan terhadap regulasi kebijakan sehingga celah-celah seperti ini dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi. Dalam teori agensi, kurangnya transparansi dapat menciptakan keuntungan bagi pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan mereka, pemerintah selaku agen mungkin memiliki kepentingan sendiri yang tidak selalu memaksimalkan kesejahteraan masyarakat (prinsipal) (Rahmadanni dan Deviani, 2022).

Tindak penyelewengan dana bantuan sosial covid-19 yang dilakukan oleh Juliari Batubara menjadi salah satu contoh nyata adanya krisis transparansi. Kelemahan ini mengindikasikan adanya penurunan proses demokrasi di Indonesia. Kasus ini memperlihatkan betapa minimnya transparansi dalam hal pendistribusian dan pembuatan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kasus korupsi yang melibatkan Meteri social Juliari Batubara ini memiliki dampak yang besar terkait dengan sistem transparansi kebijakan di Indonesia. berikut adalah dampak-dampak yang dihasilkan oleh korupsi:

1. Penurunan kepercayaan public

Salah satu dampak yang jelas sekali terlihat dalam penurunan tingkat kepercayaan public terhadap kinerja pemerintahan. pengaliran dana yang dikerahkan sepenuhnya untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat malah dimanfaatkan untuk melakukan tindak korupsi untuk kepentingan para pejabat pemerintah. Sehingga bukan menutup permasalahan, justru malah memperburuk keadaan yang ada di ranah masyarakat.

2. Memperkuat persepsi negatif terhadap pemerintah

Dengan munculnya korupsi di ranah pemerintahan maka akan melanggengkan stigma negatif terhadap sebuah pemerintahan. akibatnya akan tercipta sifat apatisisme yang nantinya akan melemahkan demokrasi.

3. Terganggunya sistem ekonomi

Karena menggunakan dana yang seharusnya digunakan untuk keperluan ribadi maka akan banyak berdampak ada roses ekonomi disuatu negara. Korupsi mengakibatkan terjadinya ketidakefisienan pembangunan, meningkatnya biaya barang dan jasa, serta melonjaknya utang negara (Amalia, 2022).

Implikasi Terhadap Demokrasi

Korupsi bansos yang melibatkan pejabat tinggi pemerintah berdampak besar terhadap kepercayaan publik dan partisipasi politik warga negara, yang keduanya adalah pilar utama dalam demokrasi. Ketika masyarakat menyaksikan bahwa bantuan yang seharusnya membantu mereka justru dikorupsi, rasa percaya terhadap pemerintah berkurang drastis. Prabowo, Cooper, dan Yudiantmaja (2022) mencatat bahwa kasus-kasus korupsi dalam program bansos menimbulkan kekecewaan dan kemarahan publik, yang pada akhirnya berpengaruh pada persepsi terhadap kredibilitas pemerintah. Ketika kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun, partisipasi politik pun akan terdampak.

Selain menurunkan kepercayaan, korupsi bansos juga mempengaruhi partisipasi politik warga negara. Suryanto (2020) menunjukkan bahwa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah akibat korupsi ini dapat menurunkan motivasi mereka untuk terlibat dalam proses politik. Partisipasi politik yang menurun adalah ancaman besar bagi demokrasi, karena demokrasi membutuhkan keterlibatan aktif dari masyarakat agar berfungsi dengan baik. Jika masyarakat merasa suara mereka tidak akan mempengaruhi kebijakan atau tindakan pemerintah, mereka mungkin semakin enggan untuk berpartisipasi dalam pemilu atau kegiatan politik lainnya.

Dampak jangka panjang dari korupsi ini juga menciptakan persepsi negatif terhadap demokrasi itu sendiri. Haryono dan Suryani (2023) berpendapat bahwa kasus korupsi semacam ini dapat menyebabkan masyarakat merasa bahwa demokrasi tidak efektif dalam mencegah pejabat yang korup. Ketika demokrasi dipersepsikan tidak berfungsi dengan baik, masyarakat mungkin cenderung mendukung pendekatan yang lebih otoriter yang dianggap lebih tegas

dalam menindak korupsi. Pandangan seperti ini dapat melemahkan fondasi demokrasi dan, dalam jangka panjang, mengancam eksistensi sistem demokrasi itu sendiri.

Faktor Penyebab Korupsi Dalam Distribusi Bantuan Sosial

Terjadinya korupsi dana bantuan sosial disebabkan oleh banyak faktor. Alasan terjadinya korupsi dapat meliputi faktor internal hingga pada faktor eksternal. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi merupakan alasan yang kuat dalam mendorong seorang individu atau kelompok dalam melakukan kejahatan korupsi demi kepentingan pribadi tanpa melihat dampak pada sekitarnya. Adapun faktor internal dan eksternal penyebab korupsi seperti ketidakpuasan Pada Kehidupan. Diketahui pejabat-pejabat pada pemerintahan Indonesia telah diberikan fasilitas-fasilitas terbaik dari pemerintah. Fasilitas-fasilitas tersebut dapat meliputi gaji pokok, tunjangan, hingga fasilitas kendaraan dinas. Adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah terhadap pejabat di Indonesia tidak menghindarkan Indonesia dari maraknya kasus korupsi. Perilaku pejabat Indonesia yang rakus akan kekuasaan justru memotivasi mereka dalam melakukan kejahatan demi menguntungkan pribadi mereka masing-masing (Timbonga, Yotham Th, 2021)

Selain itu, Perilaku konsumtif dengan tujuan untuk menampilkan kehidupan yang mewah menjadikan alasan yang kuat dalam mendorong pejabat-pejabat di Indonesia dalam melakukan tindakan korupsi. Hal ini disebabkan kehidupan yang mewah seringkali menjadi penilaian utama di kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Adanya kesempatan pejabat di Indonesia pada keterlibatannya dalam suatu program pemerintah menjadikan sebuah peluang yang besar untuk melakukan kejahatan korupsi demi keuntungan mereka dalam mencapai tujuan utama yaitu kehidupan yang mewah. Dilansir dari laman Sindonews.Com, Yusuf Lakasaeng memberikan penilaian terhadap pejabat karena pejabat yang merasa bahwa mereka merupakan elit dari masyarakat bukan pelayan bagi masyarakat sehingga hal inilah yang menyebabkan pejabat di Indonesia seringkali terlibat dalam kejahatan korupsi karena adanya tuntutan untuk menciptakan kehidupan mewah dari jabatan mereka tanpa memikirkan dampaknya bagi masyarakat Indonesia

Pada sisi lain dari penyebab korupsi berdasarkan faktor internal, kejahatan korupsi tidak luput dari adanya faktor eksternal, salah satu faktor eksternal penyebab korupsi adalah lemahnya lembaga pengawasan. Adanya kelemahan yang terdapat pada lembaga pengawasan tentu akan memberikan kesempatan yang luas bagi para pejabat di Indonesia dalam melancarkan aksinya untuk melakukan kejahatan korupsi. Seperti yang dilansir dalam lama OKEZONE.COM, penyebab eksternal dari adanya kejahatan korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara adalah lemahnya pengawasan dalam program dana bantuan sosial. Hal ini dikarenakan pemerintah yang seringkali melupakan proses evaluasi terhadap program dana bantuan sosial di masa pandemi COVID-19. Mirisnya, justru lembaga pengawasan di Indonesia seringkali menyembunyikan kasus korupsi karena telah terlibat dengan persekongkolan demi kepentingan mereka masing-masing.

Tercipta Krisis Kepercayaan Publik

Kasus korupsi dana bantuan sosial telah memberikan banyak dampak negatif di masyarakat Indonesia, salah satunya adalah krisis kepercayaan publik. Adanya kasus korupsi dana bantuan sosial mencerminkan kualitas pejabat pemerintah yang masih saja berkesempatan untuk melakukan tindakan korupsi demi kepentingan pribadi meskipun di masa-masa sulit seperti masa pandemi COVID-19. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah sehingga berdampak pada stabilitas politik di Indonesia.

Pada sisi lain, korupsi pada dana bantuan sosial yang dilakukan oleh Juliari Batubara berhasil menghasilkan memberikan kekecewaan bagi masyarakat Indonesia. Kekecewaan tersebut terlahir karena pejabat di Indonesia pada kasus korupsi dana bantuan sosial mengedepankan ego tanpa memikirkan masyarakat. Hal ini akan berdampak pada penurunan tingkat partisipasi masyarakat karena adanya krisis kepercayaan publik, sehingga masyarakat merasa bahwa

pejabat tidak mendengarkan aspirasi yang berujung pada apatis sehingga masyarakat menjadi tidak andil dalam terlibat partisipasi politik.

REFORMASI DAN TATA KELOLA BANSOS

Kasus korupsi bantuan sosial (bansos) yang melibatkan Juliari Batubara mengungkapkan kelemahan serius dalam tata kelola bansos, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Menurut Setiyono dan McCarthy (2020), teknologi digital dapat berfungsi sebagai alat pemantauan yang efektif dalam meningkatkan transparansi distribusi bansos.

Selain penggunaan teknologi, diperlukan audit independen dan pelaporan berkala yang diumumkan secara publik. Prasetyo (2021) menekankan pentingnya keterlibatan lembaga pengawas eksternal untuk mengawasi dana publik yang besar ini, yang bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak. Audit independen ini dapat membantu mengurangi ruang untuk korupsi karena adanya pengawasan dari berbagai pihak, termasuk publik. Terakhir, transparansi data penerima bansos adalah langkah penting lainnya. Melibatkan masyarakat dalam verifikasi data penerima melalui publikasi daftar penerima bansos akan membantu meningkatkan akurasi data, memastikan bahwa hanya mereka yang berhak yang menerima bantuan, serta meningkatkan kontrol sosial untuk mencegah manipulasi data (Yusuf & Wijaya, 2022).

KESIMPULAN

Kasus korupsi bantuan sosial atau bansos yang dilakukan oleh Juliari Batubara selaku mantan menteri sosial merupakan salah satu perwujudan dari lemahnya sistem pengawasan, longgarnya kebijakan serta hilangnya transparansi. Lemahnya pengawasan serta hilangnya transparansi membuka peluang bagi pemerintah untuk melakukan tindakan menyejahterakan diri sendiri dengan memanfaatkan celah yang ada. Perilaku korupsi ini dapat merusak tatanan demokrasi, hilangnya kepercayaan oleh publik, dan melanggengkan persepsi buruk yang ada di masyarakat mengenai pemerintah. Diperlukan pembenahan mengenai tindak korupsi ini, memperkuat kebijakan yang telah dibuat, terbukanya berbagai informasi untuk masyarakat/transparan, dan adanya lembaga pengawasan yang baik.

REFRENSI

- Haryono, Y., & Suryani, R. (2023). *Public perception of democracy amidst corruption in social assistance programs: An Indonesian case study*. *Journal of Political Studies*, 15(2), 113-129.
- Prabowo, H. Y., Cooper, K., & Yudiatmaja, E. (2022). *Corruption in social aid distribution: Implications for democracy and trust in government*. *Governance Review*, 27(1), 45-61.
- Prasetyo, B. (2021). *Transparency and accountability in social assistance governance in Indonesia: Lessons from the 2020 corruption case*. *Journal of Public Administration*, 11(3), 231-250.
- Setiyono, B., & McCarthy, J. (2020). *Digital transparency mechanisms in public service delivery: Case of social assistance in Southeast Asia*. *Asia-Pacific Public Administration Journal*, 8(4), 74-89.
- Suryanto, T. (2020). *Political participation and corruption in Indonesia: A closer look at social assistance programs*. *Indonesian Journal of Political Science*, 14(1), 85-102.
- Yusuf, M., & Wijaya, A. (2022). *Enhancing public transparency and accountability in Indonesian social programs*. *Asian Public Policy*, 9(2), 93-105
- Pujileksono, S., & Siregar, M. (2022). PEMAHAMAN KORUPSI DALAM TEORI PILIHAN RASIONAL DAN HUBUNGAN PRINSIPAL-AGEN. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol)*, 2(2), 143-147. <http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v2i2.259>

- Andreas W. Finaka, Yuli Nurhanisah, Ananda Syaifullah. (n.d.). *Semangat Berbenah! Indeks Persepsi Korupsi Belum Membaik*. Indonesia Baik. Retrieved November 30, 2024, from <https://indonesiabaik.id/infografis/semangat-berbenah-indeks-persepsi-korupsi-belum-membaik>
- Fuad, H. (2020, December 8). Terungkap, Ini Alasan Mensos Juliari Batubara Bisa Korupsi Bansos Covid-19 : Okezone Economy. *Economy Okezone.com*. <https://economy.okezone.com/amp/2020/12/08/320/2323885/terungkap-ini-alasan-mensos-juliari-batubara-bisa-korupsi-bansos-covid-19?page=1>
- Intan Leliana., et al. (2021). Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara Di Kompas.Com Dan BBC Indonesia.Com. *Cakrawala-Jurnal Humanioran dan Sosial*, 21(1), 60-67.
- Pratiwi, PS., & Ningsih, S. (2022). Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Pada Pelayanan Publik di Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur Tahun 2020. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 5(1), 44-50. <https://doi.org/10.61332/ijpa.v5i1.41>
- Pustha, Fabianus Wahyu Tri Buana & Alfiansyah Fauzan. (2021). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCEGAHAN DAN UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(2), 580-585. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2>
- Suhartono, S., Sahlan, S., & Jiwantara, F. A. (2023). DEMOKRASI BERBIAYA TINGGI PENYEBAB KORUPSI SEAKAN ABADI. *SENTRI Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), 2372-2380. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i6.1054>
- Chen, C., & Ganapati, S. (2021). Do transparency mechanisms reduce government corruption? A meta-analysis. *International Review of Administrative Sciences*, 89(1), 257-272. <https://doi.org/10.1177/00208523211033236>
- Ardila, I., Fauziah, D. A., Putri, K. R., Firnanda, A., & Hardiansyah, M. A. (2023). Penyalahgunaan kekuasaan dalam tindakan korupsi bantuan sosial oleh pejabat publik perspektif Max Weber. *Reformasi*, 13, 2. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/4029/pdf>
- Mungiu-Pippidi, A. (2022). Transparency and corruption: Measuring real transparency by a new index. *Regulation & Governance*, 17(4), 1094-1113. <https://doi.org/10.1111/rego.12502>
- Aristri Rahma Magistra. (2023). Pengaruh Budaya Korupsi dalam Pengikisan Peran Kehidupan Berkedaulatan Rakyat. *Sovereignty*, 2(3), 253-261. Retrieved from <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/222>
- Hasoloan, R. J., Larasati, M. G. D., Yusuf, F. E., Imantria, D. B., & Sulistyawati, N. (2022). The spirit of the Anti-Corruption movement in the campus environment through various community creativity social media movements. *Journal of Creativity Student*, 7(2), 283-310. <https://doi.org/10.15294/jcs.v7i2.38207>
- Transparansi tanggung jawab sosial perusahaan di PTPN IV Regional III Kabupaten Kampar. (2024). *Journal of Public Administration*, 1(1). <https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar/article/view/16616>
- Anderson, J. E. (1975). *Public Policymaking: An Introduction*. <http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA44401909>
- Schmitter, P. C., & Karl, T. L. (1991). What Democracy Is . . . and Is Not. *Journal of Democracy*, 2(3), 75-88. <https://doi.org/10.1353/jod.1991.0033>
- Timbonga, Yotham Th, D. N. M. (2021). ANALISIS YURIDIS SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. *Paulus Legal Research*, 1(1), 47-55.